

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan secara luring di Apotek Alba Medika selama lima minggu (16 April 2024 – 18 Mei 2024) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika telah memberikan gambaran kepada calon Apoteker mengenai pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pengadaan, penerimaan dan penyimpanan sediaan kefarmasian sesuai standar dan peraturan yang berlaku.
2. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika telah memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk Mengamati dan mempelajari kegiatan pelayanan kefarmasian seperti pelayanan resep, swamedikasi dan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang profesional sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika telah memberi gambaran dan menambah pengetahuan kepada calon Apoteker dalam pengembangan usaha praktek farmasi komunikasi di Apotek, berupa tata cara pendirian Apotek, pengelolaan Apotek, pengelolaan uang dan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika membantu calon Apoteker untuk semakin mengembangkan diri, memperdalam ilmu dan menambah wawasan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA), baik

dari segi pengetahuan, keterampilan, *soft skills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang telah dilaksanakan secara luring di Apotek Alba Medika selama lima minggu (16 April – 18 Mei 2024), terdapat beberapa saran antara lain:

1. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya mempersiapkan diri dengan baik sebelum melaksanakan praktik kerja di apotek seperti menambah wawasan dan pengetahuan yang cukup tentang obat-obatan yang umum atau sering digunakan oleh masyarakat serta keterampilan dalam berkomunikasi kepada pasien sehingga dapat memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien.
2. Mahasiswa calon Apoteker harus berperan aktif dalam melaksanakan semua kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) serta aktif berdiskusi dan menggali informasi kepada Apoteker pembimbing di Apotek agar dapat memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan yang dapat berguna untuk calon Apoteker dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Apoteker saat melaksanakan pelayanan di Apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- American Pharmacists Association. 2012, *Drug Information Handbook 21st Edition*, Volume 59, Lexicomp's Drug Referens Handbook.
- Brayfield, A., 2014, Martindale The Complete Drug Reference 38th Edition, Pharmaceutical Press, London.
- British National Formulary (BNF), 2021, British National Formulary 81 March-September 2021, Royal Pharmaceutical Society, London.
- British National Formulary (BNF), 2022, British National Formulary 83 March-September 2022, Royal Pharmaceutical Society, London.
- British National Formulary (BNF), 2019, British National Formulary for Children, September 2019, Royal Pharmaceutical Society, London.
- Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.
- Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Dipiro, J.T., Et Al. 2020, *Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, Eleventh Edition*, Mcgrawhill.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Katzung, B. G., 2015, Basic & Clinical Pharmacology 9th Edition, McGrawHill Education, New York

- Kementerian Kesehatan RI, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- McEvoy, G. K. 2011, *AHFS Drug Information Essentials*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda.
- Menteri Kesehatan RI, 1990, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 Tentang Obat Wajib Apotek Nomor 1, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 1993, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/MENKES/PER/X/1993 Tentang Daftar Obat Wajib Apotek Nomor 2, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 1993, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 925/MENKES/PER/X/1993 Tentang Daftar Obat Wajib Apotek Nomor 1, Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI, 1999, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1776/Menkes/SK/X/1999 Tentang Daftar Obat Wajib Apotek Nomor 3. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan, 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Klinik, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan dan Kategori Obat, Jakarta
- Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.
- Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional.
- Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
- Peraturan Pemerintahan, 2021, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.
- U.S. Pharmacopeia. *The United States Pharmacopeia, 2021, USP 44/The National Formulary*, NF 39, The United States Pharmacopeial Convention, Rockville.